



BDK YOGYAKARTA

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III

TAHUN 2025

**Kementerian Keuangan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta**



Kata Pengantar

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintah juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta merupakan pemenuhan atas kewajiban tersebut sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Melalui laporan kinerja ini, diuraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, serta realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2025. Semoga bermanfaat bagi kalangan luas, terutama pihak-pihak yang terkait.

Yogyakarta, Oktober 2025
Kepala Balai,



Ditandatangani secara elektronik
Endang Widajati



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja BDK Yogyakarta disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang triwulan III tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja BDK Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 Tanggal 18 April 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terhitung mulai tanggal 18 April 2023 Balai Pendidikan dan Keuangan memiliki struktur organisasi baru.

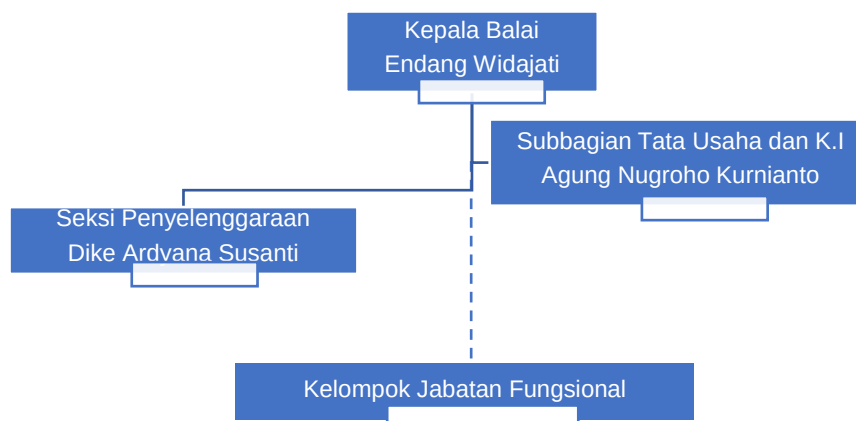
Tugas pokok dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tercantum di Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 79/PMK.01/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta meliputi hal-hal sebagai berikut:



1. pemberian dukungan teknis pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan;
2. penyelenggaraan pembelajaran dan fasilitas implementasi sistem pembelajaran di bidang keuangan negara;
3. pemberian dukungan teknis pelaksanaan evaluasi pembelajaran di bidang keuangan negara di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan;
4. pemberian dukungan teknis pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi;
5. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajaran di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
6. pelaksanaan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan;
7. penyusunan rencana kerja dan anggaran Balai Diklat Keuangan;
8. pengelolaan data dan informasi, kinerja dan risiko di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
9. pengelolaan komunikasi publik di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
10. pelaksanaan manajemen mutu pembelajaran di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
11. pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan internal terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
12. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
13. pengembangan sumber daya manusia Balai Diklat Keuangan;
14. pelaksanaan administrasi Balai Diklat Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta memiliki satu Jabatan Eselon III, dua Jabatan Eselon IV, serta jabatan fungsional. Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta secara lengkap dapat dilihat dalam **Gambar 1.1**. Seperti terlihat dalam gambar di bawah.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BDK Yogyakarta



1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal

Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan perpustakaan, fasilitasi dukungan teknis layanan pembelajaran, penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar, pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan data dan informasi, kinerja dan risiko, pelaksanaan penjaminan mutu layanan pembelajaran, pemantauan pengendalian *intern* dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Balai Diklat Keuangan.

2. Seksi Penyelenggaraan

Seksi Penyelenggaraan Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pembelajaran terkait keuangan negara, fasilitasi implementasi sistem pembelajaran, dan fasilitasi dukungan teknis pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sertifikasi, dan uji kompetensi, serta penyelenggaraan layanan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara memiliki tugas pokok Widyaiswara adalah mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Diklat Pemerintah masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Widyaiswara harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan lembaga diklat pemerintah yang bersangkutan dan dengan mengacu pada peraturan-peraturan terkait dengan jabatan fungsional Widyaiswara.

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN yang selanjutnya disebut dengan Pranata Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Diklat Yogyakarta didukung oleh pegawai yang terdiri dari satu pejabat administrator, dua pejabat pengawas, lima pejabat fungsional (Widyaiswara), satu pejabat fungsional keuangan dan pelaksana sebanyak 17 pegawai.

Diagram 1.1 Data Pegawai BDK Yogyakarta





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu perangkat manajemen dalam memandang masa depan dan melihat peluang atau tantangannya untuk mencapai visi dan menjalankan misi organisasi. Perencanaan strategis tidak hanya memperkirakan kejadian masa depan, namun juga mempengaruhi masa depan melalui mobilisasi sumber daya dan kegiatan.

Perencanaan strategis akan diimplementasikan oleh organisasi beserta seluruh pegawai di dalamnya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dengan memperhatikan faktor internal dan lingkungan strategis. Rencana strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan meliputi visi, misi, kegiatan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

1. Visi Organisasi

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan para pegawai Kementerian Keuangan khususnya di daerah memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan peran tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta menetapkan visi “Menjadi pengelola diklat terunggul dan dipercaya masyarakat dalam menghasilkan manusia yang profesional di bidang keuangan negara di daerah”.

2. Misi Organisasi

Dalam menunjang tercapainya visi tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta menetapkan misi sebagai berikut:

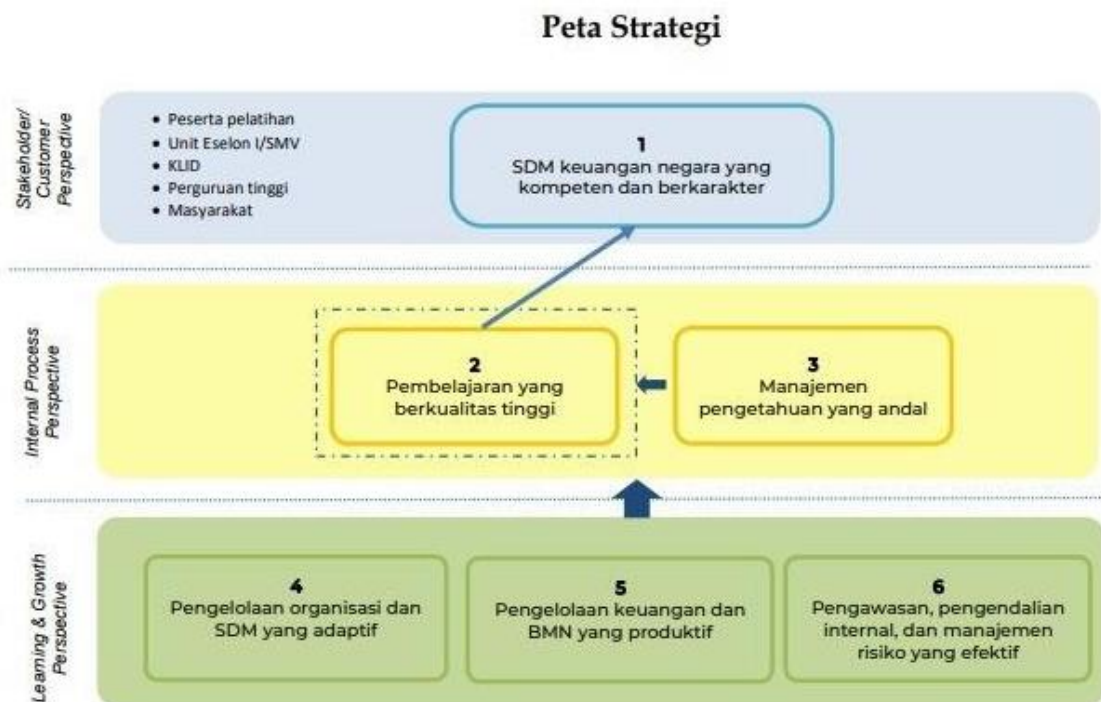
- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan negara di daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
- 2) Senantiasa memperbarui diri melalui proses organisasi belajar (*learning organization*) sesuai dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal.
- 3) Berpartisipasi dalam mengembangkan masyarakat yang sadar keuangan negara.

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Strategy map atau peta strategi adalah sebuah diagram yang menunjukkan visi, misi dan strategi organisasi yang diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari pada setiap unit bisnis. Dalam meningkatkan penyelenggaraan proses bisnisnya Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta merumuskan peta strategi yang nantinya akan diimplementasikan oleh semua jajaran dalam rangka mencapai visi dan misi. Berikut adalah peta strategi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta.



Diagram 2.1 Peta Strategi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta



1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta menyusun perjanjian kinerja yang secara rinci dapat di lihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-CP Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%
		1d-N Tingkat Implementasi Learning Organization	100%
		1e-N Indeks kepuasan layanan akreditasi	100
		1f-N Indeks kualitas pemahaman literasi keuangan negara di kalangan akademis dan mahasiswa di wilayah DIY	3 (3 skala 5)
2	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	2a-CP Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%



3	Manajemen pengetahuan yang andal	3a-CP	Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC	100%
		3b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100
		3c-N	Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan	100%
4	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	4a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%
		4b-N	Tingkat penguatan budaya dan bintal Pejabat Administrator di lingkungan Kemenkeu	100%
5	Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif	5a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		5b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
6	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	6a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92.5

IKU *cascading* peta yang dilaksanakan tahun 2025 antara lain Indeks integritas, tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan, tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi, tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran, persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform* KLC, indeks efektivitas komunikasi, tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara, indeks kualitas kualitas pengelolaan keuangan BA 015, indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan, dan indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi.

Sementara IKU *NonCascading* antara lain, tingkat implementasi *learning organization*, indeks kepuasan layanan akreditasi, indeks kualitas pemahaman literasi keuangan negara di kalangan akademis dan mahasiswa di wilayah DIY, tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan, tingkat penguatan budaya dan bintal pejabat administrator di lingkungan Kemenkeu.

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Salah satu tujuan dari manajemen risiko adalah menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya.

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta tahun 2025 menetapkan lima sasaran risiko untuk dimitigasi sebagai berikut.

No	Sasaran	Risiko
a	SDM Keuangan Negara yang Kompeten dan Berkarakter	Tingkat pemahaman pegawai terhadap <i>learning organization</i> belum memadai



b	SDM Keuangan Negara yang Kompeten dan Berkarakter	Layanan yang diberikan tidak memenuhi standar layanan dan/atau ekspektasi yang diharapkan pengguna layanan
c	Manajemen Pengetahuan yang Handal	Proses Manajemen Pengetahuan belum berjalan secara efektif
d	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	<i>Ownership</i> pegawai terhadap organisasi
e	Pengawasan Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko yang Efektif	Jumlah dan/atau kompetensi SDM UKI yang kurang memadai

3. Anggaran

Program Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta adalah Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara sedangkan kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta adalah Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, per 25 September 2025, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.4.973.708.000,-. Dari jumlah pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk lima KRO yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Layanan Dukungan Manajemen Internal, dan Layanan Manajemen SDM Internal.

Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025 terdiri dari dua kegiatan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.329.945.000,-.
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.643.763.000,-.

Berikut pembagian anggaran berdasarkan rincian *output* (RO) seperti tersaji pada **Tabel 2.1.**

Tabel 2.1 Ringkasan Anggaran Berdasarkan Jenis RO

No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)
1	4679.EBA.103	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaan Unit	5.000.000
2	4679.EBA.105	Kerumahtanggaan	146.000.000
3	4679.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.839.461.000
4	4679.EBB.101	Kendaraan Bermotor	28.000.000
5	4679.EBB.102	Peralatan Fasilitas Perkantoran	18.841.000
6	4679.EBB.103	Gedung/Bangunan	292.643.000
7	4683.DCF.102	Pembelajaran Digital	124.060.000
8	4683.DCF.103	Pembelajaran Klasikal	2.095.971.000
9	4683.DCF.106	Manajemen Pengetahuan	19.320.000
10	4683.DCF.320	Pelatihan Aplikasi SIMAN v2 bagi Pengguna Barang (PU)	135.936.000
11	4683.EBA.109	AKP Kewilayahan	13.400.000
12	4683.EBA.994	Layanan Perkantoran	214.576.000



No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)
13	4683.EBC.101	Pengembangan SDM	40.500.000
Total			4.973.708.000

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran 2025 mengalami efisiensi (blokir anggaran) sebesar Rp.3.084.653.000,- sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan, dimana belanja modal ditiadakan dan pembelajaran klasikal hampir seluruhnya dihapuskan dan ada yang diubah menjadi pembelajaran digital. Penyerapan anggaran yang terealisasi sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp.1.205.895.690,- atau 63,84% dari pagu setelah blokir yaitu Rp.1.889.055.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta Tahun 2025 terdiri dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk 6 Sasaran Strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana disajikan dalam **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Target dan Capaian IKU Tahun Anggaran 2025

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Q3	Capaian
SDM Keuangan Negara yang Kompeten dan Berkarakter	1	Indeks integritas	100	100	100
	2	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	70%	100%	120
	3	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%	113,20%	113,20
	4	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	100%	120%	120
	5	Indeks kepuasan layanan akreditasi	100	120	120
	6	Indeks kualitas pemahaman literasi keuangan negara di kalangan akademis dan mahasiswa di wilayah DIY	3	4	120
Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi	7	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%	100%	100
Manajemen Pengetahuan yang Andal	8	Persentase pemanfaatan <i>knowledge</i> pada <i>platform</i> KLC	100%	120%	120
	9	Indeks efektivitas komunikasi	100	120	120
	10	Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan	100%	120%	120
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	11	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%	115,67%	115,67
	12	Tingkat penguatan budaya dan bintal Pejabat Administrator di lingkungan Kemenkeu	100%	120%	120
Pengelolaan keuangan dan BMN yang adaptif	13	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	120	120
	14	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	120	120
Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	15	Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi	76	97,58	120

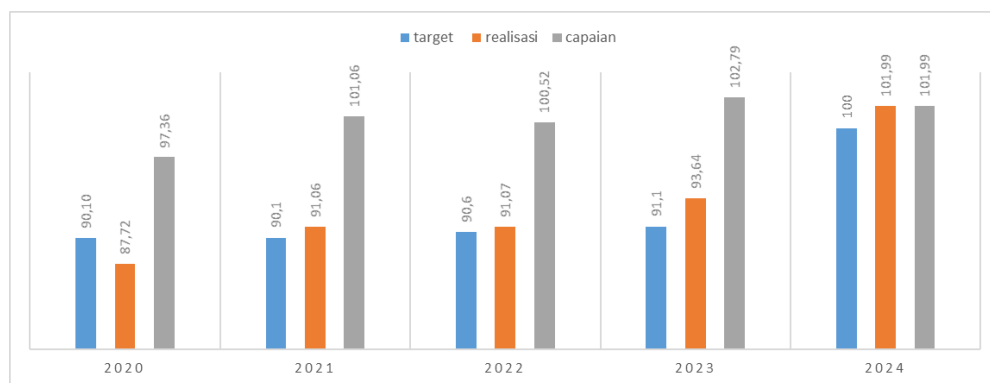


IKU 1. Indeks integritas

Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 1a-CP	SS: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter IKU: Indeks integritas								
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s. d. Q3	Q4	s. d. Q4	Y	PolIKP
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	Mak/TLKV
Realisasi	100	100	100	100	100	-	-	-	
Capaian	100	100	100	100	100	-	-	-	

Ruang lingkup IKU indeks integritas terdiri dari dua komponen, yaitu tingkat penguatan integritas dan tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM dan tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBBM.

IKU ini bertujuan untuk memastikan peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi Kementerian Keuangan. Komponen pada tingkat penguatan integritas ini mengukur persentase tindak lanjut rekomendasi hasil SPI tahun sebelumnya dan mengukur pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sesuai dengan rencana aksi hasil SPI. Realisasi indeks integritas dalam lima tahun terakhir seperti **Grafik 3.11** di bawah.



Grafik 3.11 Capaian IKU Indeks Integritas tahun 2020 s.d. 2024

Akar masalah dalam pelaksanaan IKU ini adalah mekanisme pengawasan dan pengendalian internal masih membutuhkan penguatan terutama terkait efektivitas *early warning system*, saluran pengaduan, dan sosialisasi antikorupsi.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah untuk mencapai IKU ini adalah:

1. Sosialisasi integritas terhadap seluruh pegawai ASN dan PPNN BDK Yogyakarta.
2. Mengedarkan ND Imbauan Tidak Memberikan Gratifikasi dalam rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
3. Sosialisasi Antikorupsi Internal: Penguatan Integritas Pegawai dalam rangka Meraih Predikat WBBM (13 Februari 2025).
4. Sosialisasi Antikorupsi Eksternal: Sosialisasi Antikorupsi Eksternal: Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan (12 Juni 2025).
5. Persiapan penilaian WBBM tahun 2026



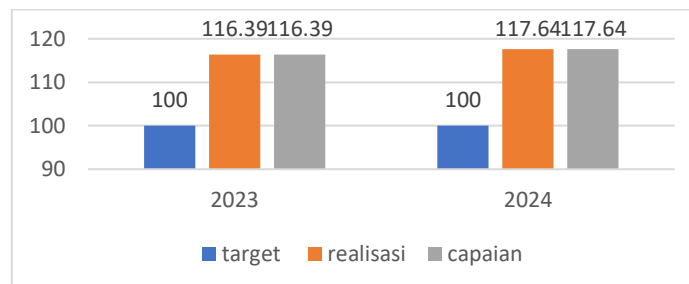
Rekomendasi rencana aksi yang akan diperlukan untuk menjaga agar penilaian IKU integritas dapat dilaksanakan dengan sosialisasi integritas kepada pegawai secara rutin.

IKU ini masuk ke dalam pemantauan risiko dan merupakan risiko turunan di seluruh unit Kementerian Keuangan (*Top Risk Kemenkeu Wide*), yaitu risiko penguatan integritas pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan.

IKU 2. Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan

Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 1b-CP	SS: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter IKU: Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s. d. Q3	Q4	s. d. Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	42.86%	57.14%	57.14%	100%	100%	-	-	-	
Capaian	120	114.28	114.28	120	120	-	-	-	

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan *stakeholders*. IKU ini mengukur Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* (IKPK), Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL), dan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024. Realisasi tingkat kepuasan pengguna layanan dalam dua tahun terakhir seperti **Grafik 3.12** di bawah.



Grafik 3.12 Capaian IKU Pemenuhan Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada tahun 2024 dengan tema Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Pelatihan (pelatihan klasikal dan jarak jauh) secara *hybrid* yang dihadiri oleh perwakilan pengajar, peserta pelatihan, perwakilan *stakeholder* unit kerja, dan perwakilan media. Masukan-masukan atas pelaksanaan FKP 2024, telah ditindaklanjuti di tahun 2024 dan 2025.

Hingga triwulan III, Balai Diklat Yogyakarta telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan penyelenggaraan pelatihan dengan akumulasi hasil SKM yaitu 3,81 (kategori Sangat Baik).

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam merealisasikan IKU ini adalah meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder* agar pelayanan yang diberikan dapat memenuhi standar yang diharapkan oleh *stakeholder*.

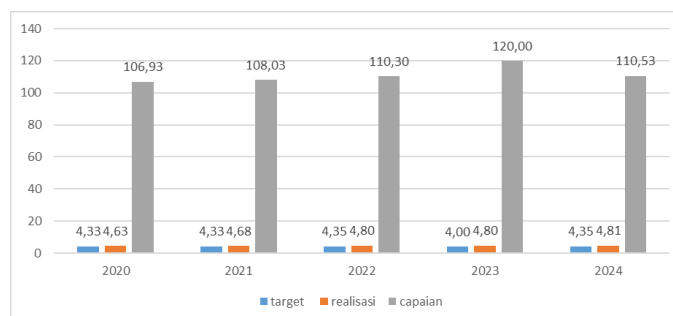


IKU 3. Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi

Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 1c-CP	SS: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter IKU: Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	112.64%	112.53%	112.53%	113.20%	113.20%	-	-	-	
Capaian	112.64	112.53	112.53	113.2	113.2	-	-	-	

IKU ini bertujuan mengukur kualitas pembelajaran BPPK yang terdapat pada kalender pembelajaran dan terdiri dari pembelajaran jarak jauh, *e-learning*, dan pembelajaran klasikal. Pengukuran kualitas pembelajaran menggunakan indeks persepsi peserta yang sesuai dengan ketentuan evaluasi pembelajaran yang berlaku di BPPK, yakni Peraturan Kepala Badan nomor 6 tahun 2024 (Perkaban 6/2024) tentang Pedoman Manajemen Pembelajaran. Seluruh butir pertanyaan yang diamanatkan melalui Perkaban 6/2024 termasuk dalam perhitungan IKU. Selain itu, juga diukur penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi pelatihan.

Capaian IKU Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi selama lima tahun terakhir adalah sebagaimana pada **Grafik 3.13** di bawah.



Grafik 3.13 Capaian IKU Implementasi Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi

IKU 4. Tingkat implementasi *learning organization*

Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 1d-N	SS: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter IKU: Tingkat implementasi <i>learning organization</i>								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	-	-	-	
Capaian	120	120	120	120	120	-	-	-	

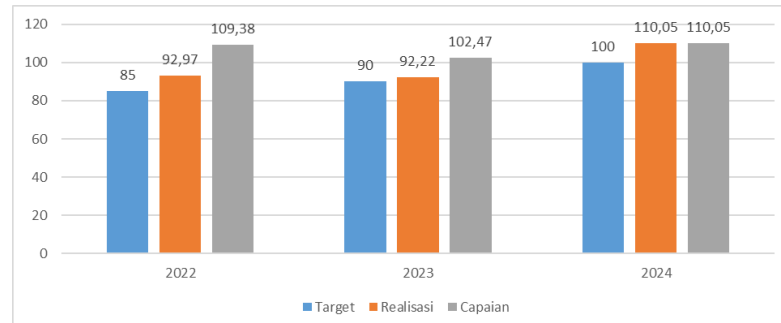
IKU ini merupakan IKU *noncascading* yang bertujuan untuk mengukur tingkat implementasi LO di lingkungan BPPK, yang dilihat dari dua sisi, yaitu BPPK sebagai pengelola pembelajaran (melakukan asistensi ke UE1 lain diluar BPPK), dan sebagai pengguna pembelajaran (penguatan implementasi LO di internal BPPK).

Realisasi capaian IKU dihitung berdasarkan pemenuhan beberapa komponen diantaranya nilai kepuasan asistensi LO, penyusunan rencana kerja implementasi LO, penyusunan



proposal inovasi, penyusunan Rencana Aksi Pembelajaran, penyusunan laporan implementasi inovasi, dan nilai tingkat implementasi LO.

Capaian IKU tingkat implementasi *learning organization* tiga tahun terakhir adalah sebagaimana **Grafik 3.14** dibawah.



Grafik 3.14 Capain IKU Implementasi *Learning Organization*

Tindakan yang telah dilakukan hingga triwulan I adalah:

1. Penentuan rencana kerja implementasi LO tahun 2025
2. Penyusunan proposal inovasi
3. Penyusunan RAP
4. Asistensi LO

IKU 5. Indeks kepuasan layanan akreditasi

Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 1e-N	SS: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter IKU: Indeks kepuasan layanan akreditasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	117.73	117.73	116.87	116.87	-	-	-	
Capaian	120	117.73	117.73	116.87	116.87	-	-	-	

IKU ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu penyusunan rencana kerja akreditasi dan mengukur kepuasan BPSDM pengguna layanan akreditasi. Realisasi ketercapaian IKU diukur berdasarkan nilai ketepatan waktu penyusunan rencana kegiatan akreditasi dan nilai survei atas layanan pendampingan akreditasi, survei pemantauan, dan evaluasi akreditasi.

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta telah menyusun rencana kerja kegiatan asistensi akreditasi program pelatihan – BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan melaksanakan kegiatan asistensi akreditasi serta membuat kuesioner survei atas layanan asistensi akreditasi pada triwulan III.

IKU 6. Indeks kualitas pemahaman literasi keuangan negara di kalangan akademis dan mahasiswa di wilayah DIY

Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 1f-N	SS: SDM keuangan negara yang kompeten dan berkarakter IKU: Indeks kualitas pemahaman literasi keuangan negara di kalangan akademis dan mahasiswa di wilayah DIY								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	Y	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	3	Max/TLKV
Realisasi	5	5	5	4	4	-	-	-	
Capaian	120	120	120	120	120	-	-	-	



IKU ini merupakan IKU *noncascading* yang bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pengetahuan, wawasan, dan persepsi atas keuangan negara di kalangan akademis dan mahasiswa di wilayah DIY.

Pada triwulan III telah dilaksanakan empat kali kegiatan edukasi – Komunita.

IKU 7. Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran

Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 2a-CP	SS: Pembelajaran yang berkualitas tinggi IKU: Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	100%	120%	120%	120%	120%	-	-	-	
Capaian	100	120	120	120	120	-	-	-	

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pembelajaran dengan berdasar pada standar mutu pembelajaran yang berlaku di BPPK dan penyelesaian rekomendasi hasil pengukuran tahun sebelumnya. Pengukuran kualitas pembelajaran berdasarkan Kepkaban 250/2024 diatur dengan pembobotan sebagai berikut:

- 80% dari hasil penilaian mutu tahun berkenaan, dengan komponen:
 - 70% dari hasil penilaian aspek proses, dan
 - 30% dari hasil penilaian aspek hasil
- 20% dari penyelesaian hasil rekomendasi penilaian mutu tahun sebelumnya.

Pelaksanaan penjaminan mutu dikoordinasikan oleh Pusbin JFPM secara tahunan dan/atau sesuai kebutuhan. Kriteria yang diuji dalam penjaminan mutu meliputi ketersediaan/kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, akurasi waktu, dan kelengkapan atribut. Ruang lingkup dan pembobotan penilaian penjaminan mutu pembelajaran pada Pusdiklat dan Balai Diklat Keuangan (BDK) mengikuti Standar Mutu Pembelajaran yang berlaku. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dihitung berdasarkan rekomendasi yang sudah diselesaikan dan dibandingkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Berita Acara (BA) hasil audit penjaminan mutu tahun 2024.

IKU 8. Persentase pemanfaatan *knowledge* pada *platform KLC*

Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 3a-CP	SS: Manajemen pengetahuan yang andal IKU: Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	-	-	-	
Capaian	120	120	120	120	120	-	-	-	

IKU ini bertujuan mengukur pemanfaatan pengetahuan dalam bentuk Aset Intelektual (AI) dan penerapan pengetahuan yang diperoleh dari AI dalam pelaksanaan pekerjaan/pencapaian target kinerja. Implementasi manajemen pengetahuan ini sesuai tahapan dalam manajemen pengetahuan.



Pemanfaatan/penerapan Aset Intelektual (AI), diukur menggunakan dua komponen yaitu:

1. jumlah views AI di KLC; dan
2. hasil *self-assessment* pemanfaatan AI pada unit kerja.

Tindakan yang telah dilakukan sepanjang triwulan III adalah mewajibkan setiap pegawai untuk menonton video pada KMS (views AI)

IKU 9. Indeks efektivitas komunikasi

Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 3b-CP	SS: Manajemen pengetahuan yang andal IKU: Indeks efektivitas komunikasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	118.71	118.71	120	120	-	-	-	
Capaian	120	118.71	118.71	120	120	-	-	-	

IKU ini mengukur tingkat efektivitas komunikasi publik dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi. Sebagai *early warning system* dalam menjaga reputasi Kemenkeu yang tercermin dari jumlah opini negatif di media massa (apakah berada di posisi krisis, *current*, *emerging*, atau masih berada pada *potential stage*), diperlukan untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat sehingga reputasi/persepsi positif publik terhadap Kemenkeu dapat dijaga.

Tindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi realisasi IKU ini adalah tiap-tiap pegawai berpartisipasi dalam aktivasi *employee advocacy* pada aplikasi Satu Kemenkeu.

IKU 10. Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan

Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 3c-N	SS: Manajemen pengetahuan yang matang IKU: Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	-	-	-	
Capaian	120	120	120	120	120	-	-	-	

IKU ini bertujuan untuk mengukur implementasi manajemen pengetahuan sesuai tahapan manajemen pengetahuan. Tahapan manajemen pengetahuan adalah identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, dan pemantauan.

Pada triwulan III, tindakan yang telah dilaksanakan dalam mengimplementasikan IKU ini diantaranya;

1. Telah dilakukan Proses Identifikasi untuk menghasilkan Daftar Pengetahuan Kritis.
2. Sosialisasi Daftar Pengetahuan Kritis telah disampaikan ke Setban.



IKU 11. Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara

Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 4a-CP	SS: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif IKU: Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	113.75%	117.13%	117.13%	115.67%	115.67%	-	-	-	
Capaian	113.75	117.13	117.13	115.67	115.67	-	-	-	

IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM Kementerian Keuangan mampu memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan *stakeholder*. Pemenuhan realisasi diukur dalam beberapa komponen sebagai berikut:

- Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi dan Psikologi;
- Tingkat Pemenuhan SDM Keuangan Negara; dan
- Tingkat Kualitas Penguatan Budaya Kementerian Keuangan.

IKU 12. Tingkat penguatan budaya dan bintal Pejabat Administrator di lingkungan Kemenkeu

Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 4b-N	SS: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif IKU: Tingkat penguatan budaya dan bintal Pejabat Administrator di lingkungan Kemenkeu								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	-	-	-	
Capaian	120	120	120	120	120	-	-	-	

IKU ini bertujuan untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki karakter dan mental yang kuat berlandaskan Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan saling menghargai.

Formula IKU ini terdiri dari dua kegiatan yaitu pelaksanaan program pembinaan mental (bintal) dan tingkat Sinergi Antar Generasi (SAG). Dalam satu tahun harus terlaksana empat kegiatan yang mencerminkan empat bidang bintal. Untuk mendapatkan nilai optimal, maka setiap program bintal harus dihadiri oleh minimal 75% pegawai ASN keseluruhan.

Pada triwulan III, Tindakan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Pelaksanaan bintal bidang kompetensi dengan tema: Internalisasi Penguatan Pemahaman LO-PT-KM pada tanggal 19 Februari 2025.
2. Bintal bidang kejiwaan dengan tema Pembiasaan Pola Hidup Sehat tanggal 12 Juni 2025.
3. Bintal bidang idiologi dengan tema Meningkatkan Wawasan Sejarah dan Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air pada tanggal 19 September 2025.
4. THM dengan tema Harmoni Dalam Kebersamaan pada tanggal 23 Juli 2025
5. SAKLAWASE

IKU 13. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015



Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 5a-CP	SS: Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif IKU: Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	120	120	120	120	-	-	-	
Capaian	120	120	120	120	120	-	-	-	

Pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran dan kualitas pelaporan keuangan.

Tahun 2025 ini terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang memangkas pagu anggaran 2025 sebesar 66,76% sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran mengakibatkan beberapa *output* kegiatan tidak dapat dilaksanakan (dibatalkan), sehingga organisasi berfokus pada pencapaian target *output* kegiatan yang tidak terdampak efisiensi.

IKU 14. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 5b-CP	SS: Pengelolaan keuangan dan BMN yang produktif IKU: Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	120	120	120	120	-	-	-	
Capaian	120	120	120	120	120	-	-	-	

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Komponen yang diukur adalah kualitas pengelolaan BMN (diukur dari tingkat penerimaan PNBPN) dan kualitas pengelolaan pengadaan (diukur dari tingkat penggunaan produk dalam negeri).

Dalam kaitannya dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, kegiatan-kegiatan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta sangat mendukung untuk terwujudnya sasaran-sasaran tersebut. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan baik dari aspek penyelenggaraan, SDM dan sarana prasarannya, pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi diklat. Selain itu, pengembangan teknologi informasi juga selalu ditingkatkan terutama dengan penyelenggaraan pelatihan secara jarak jauh yang membutuhkan dukungan sarana teknologi dan informasi.

IKU 15. Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi



Laporan Capaian Kinerja (LCK)									
BDK Yogyakarta 6a-CP	SS: Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif								
	IKU: Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	Y	Pol/KP
Target	73%	76%	76%	79%	79%	92.5%	92.5%	92.5%	Max/TLKV
Realisasi	87.08%	97.58%	97.58%	97.90%	97.90%	-	-	-	
Capaian	119.29	120	120	120	120	-	-	-	

IKU ini mengukur diantaranya yaitu :

- 1) Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP dari BPKP (bobot 40%)
- 2) Indeks penerapan SPI terintegrasi (bobot 30%), yang terdiri dari:
 - a. Tingkat pemanfaatan hasil pengawasan untuk manajemen risiko; dan
 - b. Tingkat implementasi RCM dalam pengawasan.
- 3) Indeks efektivitas sistem peringatan dini (bobot 30%), yang terdiri dari:
 - a. Tingkat pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti; dan
 - b. Tingkat penurunan jumlah temuan BPK terkait kelemahan SPI pada LK BA 15

3.2 Realisasi Keuangan

Jumlah pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta pada revisi pagu sampai dengan 25 September 2025 adalah sebesar Rp.4.973.708.000,- yang terdiri dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp.214.576.000,- dan pagu anggaran non belanja pegawai sebesar Rp.4.759.132.000,-. Pagu anggaran dialokasikan untuk lima KRO yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen SDM Internal. Tahun 2025 total realisasi anggaran hingga akhir triwulan III sebesar Rp.1.205.895.690,- atau sebesar 63,84% dari pagu setelah blokir. Secara rinci realisasi anggaran triwulan III Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output TA 2025

Kode	Kegiatan/ Output	Rencana (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4679.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.990.461.000	455.374.000	993.350.690	64,71%
4679.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	339.484.000	339.484.000	0	0,00%
4683.DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2.375.287.000	2.249.295.000	88.875.000	70,54%
4683.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	227.976.000	0	123.670.000	54,25%
4683.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	40.500.000	40.500.000	0	0,00%
Jumlah		4.973.708.000	3.084.653.000	1.205.895.690	

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Realisasi anggaran untuk *ouput* “Layanan Dukungan Manajemen Internal” triwulan III Tahun Anggaran 2025 realisasi sebesar Rp. 993.350.690,- (64,71%) dari pagu anggaran setelah



blokir sebesar Rp. 1.535.087.000,-. Informasi lebih rinci terkait dengan *output* untuk “Layanan Dukungan Manajemen Internal” dijelaskan dalam **Tabel 3.21**.

**Tabel 3.21. Realisasi Anggaran *Output* Layanan Dukungan Manajemen Internal
Triwulan III TA 2025**

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Alokasi setelah blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	500.000	0	0	500.000
Kerumahtangaan	59.600.000	11.179.400	18,76%	48.420.600
Layanan Perkantoran	1.474.987.000	982.171.290	66,59%	492.815.710
Jumlah	1.535.087.000	993.350.690	64,71%	541.736.310

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Sampai akhir triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Sarana dan Prasarana Internal” adalah Rp.0,- (0%) dari pagu setelah blokir yaitu Rp.0,-. Secara rinci realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Sarana dan Prasarana Internal” tersebut disajikan dalam Tabel 3.22.

Tabel 3.22. Realisasi Anggaran *Output* Layanan Sarana dan Prasarana Internal Triwulan III TA 2025

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Alokasi setelah blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0%	0
Jumlah	0	0	0%	0

3. Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan

Sampai akhir triwulan III tahun 2025, realisasi anggaran untuk *output* “Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan” adalah 70,54% atau sebesar Rp. 88.875.000,- dari pagu yang tersedia setelah blokir sebesar Rp.125.992.000,-. Secara rinci realisasi anggaran untuk *output* “Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan” tersebut disajikan dalam Tabel 3.23.

**Tabel 3.23. Realisasi Anggaran *Output* Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan
Triwulan III TA 2025**

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Alokasi setelah blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Pembelajaran Digital	124.060.000	88.875.000	71,64%	35.185.000
Pembelajaran Klasikal	0	0	0%	0
Manajemen Pengetahuan	1.932.000	0	0%	1.932.000
Pelatihan Aplikasi SIMAN v2 bagi Pengguna Barang (PU)	0	0	0%	0
Jumlah	125.992.000	88.875.000	70,54%	37.117.000

4. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Dukungan Manajemen Internal” sampai dengan triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 54,25% atau sebesar Rp. 123.670.000,- dari pagu yang



tersedia untuk *output* tersebut sebesar Rp. 227.976.000,-. Informasi lebih rinci terkait *output* untuk “Layanan Dukungan Manajemen Internal” dijelaskan dalam Tabel 3.24.

**Tabel 3.24. Realisasi Anggaran *Output* Layanan Dukungan Manajemen Internal
Triwulan III TA 2025**

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
AKP Kewilayahan	13.400.000	0	0%	13.400.000
Layanan Perkantoran	214.576.000	123.670.000	57.63%	90.906.000
Jumlah	227.976.000	123.670.000	54.25%	104.306.000

5. Layanan Manajemen SDM Internal

Realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Manajemen SDM Internal” sampai dengan triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 0% atau sebesar Rp.0,- dari pagu yang tersedia untuk *output* tersebut setelah blokir sebesar Rp.0,-. Informasi lebih rinci terkait *output* untuk “Layanan Manajemen SDM Internal” dijelaskan dalam Tabel 3.25.

Tabel 3.25. Realisasi Anggaran *Output* Layanan Manajemen SDM Internal Triwulan III TA 2025

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Alokasi setelah blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0%	0
Jumlah	0	0	0%	0

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menindaklanjuti efisiensi penggunaan sumber daya terdapat pada efisiensi anggaran yang meliputi:

1. efisiensi dengan penghapusan belanja modal baik berupa barang maupun renovasi gedung sebagai dukungan terhadap program prioritas nasional pemerintah;
2. efisiensi penggunaan anggaran juga nampak pada optimalisasi penggunaan kendaraan dinas untuk perjadi pegawai. Pemilihan pengajar mengutamakan widyaiswara dibandingkan eksternal BPPK dan eksternal Kemenkeu. Penyelenggaraan pelatihan dilakukan melalui pelatihan digital dan mengubah hampir seluruh pelatihan klasikal (tatap muka) menjadi pelatihan digital sehingga meminimalisir penggunaan anggaran;
3. efisiensi penggunaan daya listrik, penggunaan listrik dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tidak menyalakan lampu dan AC di ruangan yang tidak digunakan.

3.4 Kinerja Lain-lain

Pada Triwulan III Tahun 2025, BDK Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan sebanyak 20 pelatihan yang terdiri dari :

1.	PJJ Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan V
----	---



2.	PJJ Sekretaris Pimpinan
3.	PJJ Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan IV
4.	PJJ Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan VI
5.	PJJ Legal Due Diligence terkait Lelang Angkatan I
6.	PJJ Pelaporan Akuntansi dan Kertas Kerja TKD Angkatan III
7.	E-Learning Pengawasan atas DJP: Pengenalan Proses To Be Ekstensifikasi Angkatan I
8.	PJJ Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Piutang Pajak Angkatan I
9.	PJJ Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Angkatan V
10.	PJJ Fasilitas Perpajakan Angkatan I
11.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XXVI
12.	PJJ Penggalan Potensi Pajak Sektor Asuransi Jiwa dan Perusahaan Pembiayaan Konvensional Angkatan I
13.	PJJ Penelaah Keberatan I Angkatan I
14.	PJJ Legal Drafting
15.	E-Learning Pengantar Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai
16.	PJJ Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan V
17.	PJJ Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan VII
18.	PJJ Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Kepabeanan dan Cukai
19.	PJJ Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan VI
20.	PJJ Effective Negotiation Skills Tingkat Lanjutan Angkatan I

Selain itu, BDK Yogyakarta juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti Komunita (Komunitas Uang Kita) yang merupakan wadah berbagi pengetahuan terkait keuangan negara kepada mahasiswa beberapa universitas di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Kemenkeu Corpu Openclass yang dikemas dalam program Angkringan Reborn. Program Angkringan Reborn merupakan wadah berbagi berbagai pengetahuan yang dikemas menarik dengan nuansa budaya Yogyakarta dan berlatar belakang angkringan khas Yogyakarta. Berikut beberapa kegiatan yang diselenggarakan BDK Yogyakarta selama triwulan III Tahun 2025 :

- a. Komunita Kemenkeu Trip BDK Yogyakarta – 9 Juli 2025
- b. Kemenkeu Corpu *Open Class* (KCOC) BDK Yogyakarta dengan tema: "Regulasi Terkini Pengadaan Barang/Jasa: Implikasi Perpres 46 Tahun 2025" – 31 Juli 2025



- c. Angkringan Reborn Episode 1 : "Kantor Asri, Hati berseri, Bumi Tersenyum lagi! " – SITEN BDK YOGYA (Sinergi Terintegrasi Eco office Nyaman) - 17 September 2025
- d. Angkringan Reborn Episode 2 : *From Fear to Power* "Menemukan Keberanian, Menciptakan Perubahan, Menginspirasi Generasi" - 16 September 2025
- e. Angkringan Reborn Episode 3 : Talk show Pertumbuhan Integritas dari Teori Kohlberg – 30 September 2025
- f. Angkringan Reborn Episode 4 : Talk show "From Fear to Power; Menemukan Keberanian, Menciptakan Perubahan, Menginspirasi Generasi – 30 September 2025

3.5 Evaluasi Peningkatan Kinerja

Secara umum kegiatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan rencana dan beberapa indikasi pengukuran kinerja menunjukkan hal yang positif, pelatihan tatap muka mulai kembali dilaksanakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya peningkatan kinerja untuk ke depannya:

1. meningkatkan upaya-upaya kolaborasi dan koordinasi dengan semua *stakeholder* dalam rangka meningkatkan sinergi;
2. meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian disertai dengan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sesuai dengan budaya Kementerian Keuangan;
3. mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik berupa manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana untuk dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan, terutama dalam penyelenggaraan sistem pelatihan;
4. melakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang konstruktif, evaluasi konstruktif untuk mendapatkan akar permasalahan dan menghasilkan rekomendasi yang akurat serta menyelesaikan masalah untuk mencapai target kinerja yang maksimal.



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Triwulan III Tahun 2025 menyajikan berbagai realisasi kinerja dan anggaran sepanjang triwulan III (Juli s.d. September) tahun 2025 serta upaya-upaya dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut. Secara umum capaian indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang positif. Seluruh IKU Balai Diklat Keuangan Yogyakarta telah mencapai target yang ditetapkan. Dari segi anggaran, Tahun 2025 total realisasi anggaran hingga akhir triwulan III sebesar Rp.1.205.895.690,- atau sebesar 63,84% dari pagu setelah blokir.

Secara umum hasil capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta triwulan III Tahun 2025 sudah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian.